

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PEREDARAN KAYU TANPA IZIN
DI WILAYAH POLRES BERAU**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:
Hendro Kusmayadi
NIM. 106010103111020

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN KAYU TANPA IZIN DI WILAYAH POLRES BERAU

Hendro Kusmayadi, Sarosa Hamongpranoto, Koesno Adi
Polres Berau
Hendro.kusmayadi@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran kayu tanpa dokumen sah (*Illegal Logging*) marak terjadi di wilayah Polres Berau karena adanya kerjasama masyarakat setempat yang berperan dilapangan melakukan penebangan dengan dalih bahwa mereka menebang kayu di lokasi ladang mereka sendiri. Kemudian mereka jual para pembeli kayu lokal selaku penampung kayu. Penampung kayu inilah kemudian mengolah kayu secara moulding. Sebenarnya penegakan hukum terhadap *illegal logging* telah dilakukan sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan, namun ancaman terhadap tindak pidana tersebut seperti menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP tentang pencurian. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan dikenai Pasal-pasal dalam KUHP)

Kata Kunci: peredaran kayu tanpa izin, kehutanan, tindak pidana

ABSTRACT

Circulation of wood without valid documents (illegal logging) rife in the Berau district police due to the cooperation of local communities that play a role in the field of logging on the pretext that they were cutting wood in the location field of their own. Then they sell local timber buyers as container wood. Container wood timber is then molding process. Actual enforcement against illegal logging has been done since the inception of Act No. 5 of 1967 on the Principles of Forestry, but the threat of the offenses such as chopping, cutting, picking and carrying timber forest products without the permission of the authorities imposed the articles the Criminal Code of theft. After the promulgation of Act No. 41 of 1999 on Forestry to conduct harness timber forest produce without a permit subject to criminal authorities as set out in Article 50 jo. Article 78 of Law No. 41 of 1999 that the threat of criminal charges heavier than the Articles of the Criminal Code

Key Words: *illegal logging, forestry, criminal*

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

² Pembimbing Utama, Profesor di Universitas Mulawarman

³ Pembimbing Kedua, Doktor Bidang Pidana di Universitas Brawijaya

Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh UUD RI 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat (3), berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*) kekuasaan semata. Secara konstitusi Negara kita sudah menyatakan secara tegas dalam batang tubuhnya, bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum. Berarti sudah seharusnya hukum sebagai panglima tertinggi yang harus dijunjung tinggi keberadaan dan pemberlakuannya.

Sebagai Negara hukum, pasti yang dikedepankan adalah aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga Negara adalah sama dihadapan hukum. Itupun jelas dan terang sudah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Sehingga siapa saja yang melanggar hukum wajib dikenakan sanksi. Jangan sampai ada perlakuan yang berbeda atau justru sebaliknya yaitu adanya diskriminasi perlakuan yang sengaja dibedakan karena berbagai segi dan faktor yang menyebabkannya.

Saat sekarang ini seiring dengan maraknya perbuatan illegal logging, maka sejak tahun 1999 disahkanlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167). Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

Illegal logging sebenarnya bukan hal yang baru, sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, disaat Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Reglement Hutan 1865, Pemangku Hutan dan Eksploitasi Hutan. Sebagai aturan pertama yang dibuat dan dijalankan Pemerintah Hindia Belanda ada 2 (dua) masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reglement 1865 pada waktu itu, yaitu:

1. musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan yang dikelola tidak teratur.
2. banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan bakar dan lain-lain.

Perbuatan illegal logging itu sampai sekarang masih terjadi bahkan semakin marak terjadi secara bebas. Dalam prakteknya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kayu tanpa dokumen (*Illegal Logging*) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, karena di samping keterbatasan dari aparat penegak hukum juga banyaknya pihak yang terlibat mulai dari oknum aparat desa, kecamatan maupun *backing* dari pihak TNI/Polri sendiri. Aktivitas peredaran kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan Negara dari segi pendapatan negara maupun segi perlindungan hutan.

Pemerintah sudah mengatur mengenai prosedur pemanfaatan hasil hutan sesuai yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts-II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara. Serta tidak terbayarnya pajak kepada negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang

dipungut dari hutan Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

Berdasarkan kondisi wilayah yang merupakan kawasan berhutan dengan tingkat kerentanan lingkungan yang tinggi apabila dieksploitasi dan dengan keterbatasan biofisik yang menjadi kendala dalam pengembangan wilayah maka Kabupaten Berau tergolong ke dalam Kriteria *Land Lock*. Oleh karena itu, untuk membangun Berau dibutuhkan suatu model pembangunan yang menjamin kelestarian sumberdaya hutan yang ada namun di sisi lain pembangunan tersebut juga mampu untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat dan memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah Kabupaten.

Oleh Karena itu Kabupaten Berau dalam kegiatan pembangunan juga harus selaras dengan aturan pemerintah untuk perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Sesuai dengan Peraturan ini, maka perlindungan hutan bertujuan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Selain rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya *illegal logging* adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana *illegal logging*. Upaya pengamanan hutan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk melestarikan sumber daya alam hutan dalam rangka usaha menjaga fungsi hutan. Oleh karena itu di lingkungan Departemen Kehutanan dan perkebunan dibentuk Polisi Khusus Kehutanan (polhut) atau Jagawana. Minimnya jumlah polhut ini mengakibatkan kurangnya pengawasan hutan secara menyeluruh sehingga hal ini dijadikan sebagai peluang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana pencurian kayu. Bahkan terlibatnya sejumlah oknum aparat yang mencoba bertindak sebagai backing dari kasus *illegal logging* yang terjadi. Apabila keadaan seperti ini terus berlangsung akan mengakibatkan kerugian di berbagai pihak baik masyarakat sendiri maupun pemerintah.

Peredaran kayu tanpa dokumen sah (*Illegal Logging*) marak terjadi di wilayah Polres Berau karena adanya kerjasama masyarakat setempat yang berperan dilapangan melakukan penebangan dengan dalih bahwa mereka menebang kayu di lokasi ladang mereka sendiri. Kemudian mereka jual para pembeli kayu lokal selaku penampung kayu. Penampung kayu inilah kemudian mengolah kayu secara moulding. Bisa juga mereka jual langsung kepada konsumen karena kayu yang dibeli dari warga masyarakat setempat itu sudah berupa kayu olahan. Lalu dijual kembali kepada konsumen tanpa didasari pada dokumen kepemilikan atau keabsahan dalam hal si penjual bertindak melanggar hukum.

Sebenarnya penegakan hukum terhadap *illegal logging* telah dilakukan sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan, namun ancaman terhadap tindak pidana tersebut seperti menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP tentang pencurian. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan dikenai Pasal-pasal dalam KUHP.

Maraknya pencurian kayu tanpa dokumen yang sah (*Illegal Logging*) di Kabupaten Berau sangat sulit diberantas, selain banyaknya masyarakat yang terlibat secara langsung, juga adanya pihak luar seperti pembeli dari Malaysia yang turut bermain untuk mendapatkan kayu yang tidak ada izin tersebut. Termasuk keterlibatan aparat penegak hukum tersebut dalam proses memperlancar terjadinya jual beli kayu tanpa disertai dengan izin yang sah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis fokuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk atau modus operandi tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam tingkat penyidikan yang dilakukan dalam menanggulangi maraknya tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau?

3. Apakah upaya hukum yang dilakukan dalam meminimalisir maraknya tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka tentu saja penelitian memiliki tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk atau modus operandi tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum dalam tingkat penyidikan yang dilakukan dalam menanggulangi maraknya tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang dilakukan dalam meminimalisir maraknya tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, adalah penelitian dalam arti meneliti *law in book*, juga mengutamakan untuk dilakukan penelitian terhadap data empiris yang ada dilapangan khususnya menggali dan meneliti persepsi dari penegak hukum atau merupakan penelitian lapangan, dalam arti *law in action*¹. Dalam hal ini berkaitan dengan penanganan terhadap peredaran kayu di Berau yang masih marak dengan tingkat penegakan hukum

¹ Ronny Hanitidjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm 34-35

yang lemah, karena adanya beberapa faktor yang mendukung terjadinya peredaran kayu ilegal (*illegal logging*). Tentu saja dalam penelitian ini tidak cukup dengan penelitian pada mempelajari kepustakaan, tapi lebih didukung dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan.

Hasil Dan Pembahasan

Secara etimologis *illegal* berarti tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum, sedangkan *logging* berarti memotong atau menebang kayu. Jadi *illegal logging* berarti kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak remi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum. Definisi *illegal logging* menurut *International Tropical Timber Organization* (ITTO) adalah kegiatan *logging* yang tidak menerapkan asas kelestarian (*sustainable forest management*).

Jika dikaitkan dalam praktek, pengertian *illegal logging* terbagi 2 (dua) yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar, sedangkan pengertian secara luas menyangkut setiap perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan operasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu (TUK), pengolahan dan pemasaran.²

Pengertian sederhana menurut Pasal 75 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, yang intinya mengukur sah atau tidaknya suatu hasil hutan adalah dari kesesuaian antara isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan keadaan fisik dan jenis, jumlah

ataupun volume hasil hutan. Dengan demikian, apabila :

- a. sesuai, hasil hutan tersebut dinyatakan sah (*legal*), dan
- b. tidak sesuai, hasil hutan tersebut dinyatakan tidak sah (*illegal*).

Penebangan ilegal banyak terjadi di beberapa negara di dunia. Di lapangan secara luas terjadi di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), kawasan-kawasan hutan yang belum dialokasikan penggunaannya. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang habis masa berlakunya, beberapa konsesi hutan negara, beberapa kawasan hutan yang ditebang habis untuk konservasi lahan dan di kawasan konservasi dan hutan lindung.

Sedangkan pelaku penebangan liar (*illegal logging*) adalah :

- a. Para pekerja dari masyarakat sekitar hutan dan pendatang yang dibawa ke tempat itu
- b. Para investor (cukong), termasuk pedagang, pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau pembeli kayu ilegal dari industri pengolahan, dan
- c. Para pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, termasuk aparat penegak hukum dan para legislatif tertentu.

Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) yaitu bahwa

² Didik Prasetyo, *Illegal Logging, Suatu Malpraktek Bidang Kehutanan*, materi Semiloka Inisiatif Daerah Dalam Penanggulangan *Illegal Logging*, di Sendawar (Kutai Barat), Kalimantan Timur, Januari 2003

"Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya".

Menurut pendapat Zain bahwa istilah "kerusakan hutan" yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu, *pertama*, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.³

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat di atas. Hal tersebut karena perusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan

yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan *illegal logging*. Analisis yuridis tentang *illegal logging* yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan *illegal logging* ini merupakan kegiatan yang *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.

Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan berkelanjutan/lestari (*sustainable forest*) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerjasama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Asas *ecolabelling* adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan. Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), bahwa

³ IGM. Nurdjana, et.al., *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 16

tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah *illegal logging*.

Penegakan hukum dan keadilan di negara kita tampaknya belum maksimal, bahkan menjadi terpuruk. Keterpurukan hukum kita semakin menjadi-jadi. Kepercayaan warga masyarakat terhadap *law enforcement* semakin memburuk, sehingga khawatir masyarakat Indonesia tidak sekedar termasuk *bad trust society*, tetapi sudah sampai pada klasifikasi *worst trust society*.⁴

Keterpurukan hukum jelas berdampak terhadap sektor lain, termasuk sistem perekonomian. Untuk itu, penegakan hukum bidang kehutanan menjadi penting untuk diperhatikan dalam menangani berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai, masalah penebangan liar (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan secara liar (*illegal trade*) misalnya. Mengapa penegakan hukum bidang kehutanan masih jauh dari harapan? Hal ini dapat dipahami karena sektor kehutanan menyangkut kepentingan banyak pihak dan permasalahannya bersifat multidimensi.

Berbagai permasalahan penegakan hukum kehutanan menjadi semakin rumit lagi ketika adanya *euphoria* terhadap pemahaman otonomi daerah yang “kebablasan”, di mana memaknai otonomi daerah sebagai kedaulatan daerah. Ada beberapa kasus di suatu daerah yang muncul karena kebijakan bupati yang begitu drastis tanpa mengindahkan makna otonomi daerah secara utuh dalam bingkai integrasi nasional. Pengelolaan hutan cenderung hanya untuk kepentingan kelompok tertentu karena realitas selama ini – harus diakui juga – bahwa pengelolaan

hutan hanya “dimaling” dan dikapling oleh orang-orang pusat. Inilah sebenarnya substansi masalah karena hutan selama ini bukan betul-betul untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat semakin dipinggirkan dan terpinggirkan (marjinal), sehingga akses terhadap hutan sangat dibatasi. Ironis memang, mereka jadi asing dengan lingkungannya, bahkan ada ibarat “tikus akan mati di lumbung”.⁵

Untuk itu sangat tepat jika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menempatkan kerakyatan dan keadilan menjadi salah satu asas. Dengan asas ini diharapkan akan mendorong terciptanya penegakan hukum kehutanan di masa mendatang. Bagaimanapun upaya penegakan hukum juga dipengaruhi adanya kesadaran masyarakat untuk terwujudnya penegakan hukum itu sendiri. Tidak cukup jika hanya peraturannya saja yang baik dan aparat penegak hukum berdisiplin, tentu masih memerlukan peran serta masyarakat. Jadi, peran masyarakat dalam hal ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum.

Pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas.

Bertolak pada prinsip keseimbangan itu pertanggung-jawaban pidana didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental,

⁴ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10

⁵ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 194

yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan). Asas legalitas merupakan dasar patut dipidanya suatu perbuatan.

Sedangkan asas kesalahan yang didalamnya tidak hanya dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) melainkan juga pada perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau lalai (*culpa*).

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti kesalahan melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis pidana dan jumlah pidananya. Berkaitan dengan Illegal Logging, maka jelas dan pasti adanya atau terpenuhinya unsur kesengajaan lebih dominan terjadi. Sehingga pemidanaan tidak bisa dipergunakan KUHP, melainkan secara spesifik atau spesialis pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tepatnya pada Pasal 78 yang merujuk kepada perbuatan dalam beberapa pasal seperti Pasal 50 tentang larangan bagi siapa saja dalam melakukan perbuatan yang dapat merusak kelestarian hutan.

Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 78 yang merujuk pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masuk dalam kualifikasi perbuatan kejahatan. Pengertian kejahatan (*crime*) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis maupun kriminologis. Pengertian kejahatan (*crime*) sangatlah beragam, tidak ada

definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis maupun kriminologis.

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.⁶ Black menyatakan bahwa *crime is a social harm that the law makes punishable; the breach of a legal duty treated as the subject-matter of a criminal proceeding*,⁷ sedangkan Hoge D. Barlow, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, menyebutkan Kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law*.

Van Bemmelen merumuskan Kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Jikalau dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perumusan kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua bentuk-bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sementara pemidanaan yang

⁶ Abdul Wahid, *et.al, Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm 52

⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, Editor in Chief: Bryan A. Garner, West Group Publishing Co., St. Paul – Minnesota, 1999, hlm 380

berada di luar dari KUHP merupakan pidana yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Endro Prasetyo, SIK, MH⁸ selaku Kapolres Berau diperoleh keterangan bahwa selain instansi penegakan hukum yang terlibat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Daerah adalah KPH (Kesatuan Pengelola Hutan), yang terdiri dari:

- a. Dinas Kehutanan Kabupaten Berau
- b. Dinas Perkebunan Kabupaten Berau
- c. BKSDA Provinsi Kaltim Wilayah Kabupaten Berau

Menurut AKBP Endro Prasetyo, SIK, MH⁹ selaku Kapolres Berau diperoleh keterangan bahwa bentuk-bentuk atau modus operandi tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku menggunakan cara dengan mengangkut kayu hasil penebangan secara ilegal dengan menyimpan di bawah tumpukan kayu rakyat, sehingga tidak diketahui petugas;
- b. Kayu-kayu yang sudah ditebang dari hasil penebangan secara ilegal, kemudian dibuat kayu blambangan/bantalan dan diangkut dengan kendaraan truk dan mereka memasang jaringan di setiap jalan untuk memantau adanya patroli/razia dari petugas kepolisian;
- c. Pengangkutan kayu dilakukan pada waktu dini hari sampai menjelang subuh;

- d. Pelaku akan selalu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian apakah pihak Kepolisian akan melakukan patroli atau tidak;
- e. Pelaku menggunakan dokumen dari wilayah kabupaten lain pada saat melakukan pengangkutan kayu;
- f. Pelaku menggunakan dokumen yang sudah mati atau dengan mengikuti dokumen perusahaan yang sudah berjalan, pelaku memanfaatkan kelemahan dari dinas terkait;
- g. Cukong memberikan ongkos kepada masyarakat sekitar hutan untuk melakukan penebangan kayu di hutan yang kemudian hasil kayu tersebut diambil oleh cukong (pemberi dana) dengan dibeli secara murah;
- h. Memberikan upeti kepada oknum petugas setempat;
- i. Dalam melakukan pengangkutan kayu dari hutan sampai ke pinggir laut dengan menggunakan sarana mobil truk yaitu kayu hasil tebangan secara ilegal dimuat di mobil kemudian di atas kayu tersebut disimpan bibit sawit untuk mengelabui petugas;
- j. Kayu tebangan secara ilegal diambil di areal KBK maupun areal KBNK;
- k. Kayu diambil di areal clearing perkebunan yang tidak diambil oleh perusahaan.

Permasalahan mendasar dari sulitnya memberantas *illegal logging* dari perspektif penegak hukum (Polri) yang dikemukakan oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Erwin Mappaseng, dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

Pertama, bahwa *illegal logging* termasuk kategori kejahatan terorganisir. Kegiatan itu melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Di antara pelaku yang terlibat adalah buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), penjual, pembeli, maupun *backing* dari oknum

⁸ Wawancara dengan AKBP Endro Prasetyo, SIK, MH, selaku Kapolres Berau, pada tanggal 2 Oktober 2012

⁹ Wawancara dengan AKBP Endro Prasetyo, SIK, MH, selaku Kapolres Berau, pada tanggal 2 Oktober 2012

aparatus pemerintah dan TNI/Polri dan oknum tokoh masyarakat. Antara elemen yang satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang sangat kuat dan rapi sehingga mengakibatkan sulitnya pengungkapan secara tuntas jaringan tersebut. Lebih lanjut Mappaseng mengatakan bahwa penebangan yang dulu dilakukan secara tradisional dan konvensional, kini telah bergeser dan menggunakan pola kerja yang terorganisir dan modern dengan menggunakan sistem manajemen yang rapi dan baik dan dengan jaringan pemasaran yang luas baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu dukungan berbagai sarana dan peralatan modern membuat mobilitas kegiatannya menjadi semakin cepat dan efektif.

Kedua, karena ketidakseimbangan antara kebutuhan (*demand*) dan pasokan (*supply*). Selain itu pertumbuhan dan permintaan industri kayu luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Korea dan RRC menjadi faktor pendorong yang sangat kuat dan penyalurannya melalui *black market* (pasar gelap).

Ketiga, penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kewajiban pajak Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Yogi Hardiman, SIK¹⁰ selaku Kasatreskrim Polres Berau diperoleh keterangan bahwa dasar Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana *illegal logging* adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sedangkan untuk berita acaranya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

¹⁰ Wawancara dengan AKP Yogi Hardiman, SIK, selaku Kasatreskrim Polres Berau, pada tanggal 3 Oktober 2012

Menurut AKP Yogi Hardiman, SIK¹¹ selaku Kasatreskrim Polres Berau diperoleh keterangan bahwa di Kabupaten Berau pernah terjadi kasus penebangan pohon secara ilegal. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2010-2012, Polres Berau sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ilegal logging dengan barang bukti yang terkumpul:

- a. Kayu Ulin : ± 43 m³
 - Kayu Meranti : ± 51 m³
 - Kayu Hitam : ± 70 m³
 - Kayu Medang : ± 2 m³
 - Kayu Putih : ± 93 m³
 - Kayu Bengkiray : ± 20 m³
 - Kayu Marsolo : ± 13 m³
 - Kayu Kruing : ± 5 m³
- b. Jumlah Pelaku : 85 orang
- c. Jumlah Kapal : 11 unit
- d. Jumlah Mesin Chainsaw : 13 buah
- e. Mesin Moulding : 1 buah
- f. Mesin Circle : 1 buah
- g. Kendaraan Truk : 15 unit
- h. Kendaraan L300/Pickup : 13 unit
- i. Alat Berat : 2 unit

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPTU Totok Sudarto¹² selaku Penyidik Satreskrim Polres Berau diperoleh keterangan bahwa jumlah kasus penebangan pohon secara ilegal antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah:

- a. Selama tahun 2010 sebanyak 22 kasus
- b. Selama tahun 2011 sebanyak 26 kasus
- c. Sampai bulan Oktober 2012 sebanyak 13 kasus

¹¹ Wawancara dengan AKP Yogi Hardiman, SIK, selaku Kasatreskrim Polres Berau, pada tanggal 3 Oktober 2012

¹² Wawancara dengan AIPTU Totok Sudarto, selaku Penyidik Satreskrim Polres Berau, pada tanggal 4 Oktober 2012

Menurut AIPTU Totok Sudarto¹³ selaku Penyidik Satreskrim Polres Berau diperoleh keterangan bahwa penyelesaian terhadap kasus-kasus penebangan pohon secara ilegal dilakukan dengan cara diawali dengan penyelidikan kemudian melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan serta pemberkasan dan diakhiri dengan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan.

Sedangkan dasar hukum yang dipergunakan untuk mencegah dan menanggulangi penebangan pohon secara ilegal, menurut AKP Yogi Hardiman, SIK¹⁴ selaku Kasatreskrim Polres Berau adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam)
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- d. Perda Kabupaten Berau No. Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut AKP Yogi Hardiman, SIK¹⁵ selaku Kasatreskrim Polres Berau diperoleh keterangan bahwa selama tahun 2012 sampai bulan Oktober, jumlah kasus *illegal logging* yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II di Polres Berau adalah sebanyak 11 kasus. Setelah selesainya proses penyidikan (tahap II) selanjutnya adalah kegiatan

penyidik akan langsung melimpahkan tahanan beserta barang bukti kepada Kejaksaan.

Berbagai permasalahan penegakan hukum kehutanan menjadi semakin rumit lagi ketika adanya *euphoria* terhadap pemahaman otonomi daerah yang "kebablasan", di mana memaknai otonomi daerah sebagai kedaulatan daerah. Ada beberapa kasus di suatu daerah yang muncul karena kebijakan bupati yang begitu drastis tanpa mengindahkan makna otonomi daerah secara utuh dalam bingkai integrasi nasional. Pengelolaan hutan cenderung hanya untuk kepentingan kelompok tertentu karena realitas selama ini harus diakui juga bahwa pengelolaan hutan hanya "dimaling" dan dikapling oleh orang-orang pusat. Inilah sebenarnya substansi masalah karena hutan selama ini bukan betul-betul untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat semakin dipinggirkan dan terpinggirkan (marjinal), sehingga akses terhadap hutan sangat dibatasi. Ironis memang, mereka jadi asing dengan lingkungannya, bahkan ada ibarat "tikus akan mati di lumbung".

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Yogi Hardiman, SIK¹⁶ selaku Kasatreskrim Polres Berau diperoleh keterangan bahwa upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi penebangan pohon secara ilegal diantaranya adalah:

- a. Preemptif
 - 1) Dengan mengajak Dinas/Instansi terkait dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kepada masyarakat
 - 2) Menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penebangan pohon secara ilegal

¹³ Wawancara dengan AIPTU Totok Sudarto, selaku Penyidik Satreskrim Polres Berau, pada tanggal 4 Oktober 2012

¹⁴ Wawancara dengan AKP Yogi Hardiman, SIK, selaku Kasatreskrim Polres Berau, pada tanggal 3 Oktober 2012

¹⁵ Wawancara dengan AKP Yogi Hardiman, SIK, selaku Kasatreskrim Polres Berau, pada tanggal 3 Oktober 2012

¹⁶ Wawancara dengan AKP Yogi Hardiman, SIK, selaku Kasatreskrim Polres Berau, pada tanggal 3 Oktober 2012

- 3) Pemasangan tanda-tanda larangan menebang pohon di kawasan hutan
- b. Preventif
 - 1) Satreskrim bersama dengan jajaran Polsek, Sat Shabara, Sat Lantas dan dinas terkait melakukan giat operasi/patroli gabungan di daerah yang rawan akan terjadinya *illegal logging*.
 - 2) Menanam jaringan untuk memberikan informasi adanya penebangan pohon secara ilegal
 - 3) Mengadakan pelatihan Kadarkum terhadap RT, Kepala Desa, Linmas dan masyarakat untuk bersama-sama mengerti dan memahami amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c. Represif

Melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal logging* dengan melakukan penangkapan pelaku *illegal logging* sehingga menimbulkan efek jera.

Menurut AKP Yogi Hardiman, SIK¹⁷ selaku Kasatreskrim Polres Berau diperoleh keterangan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penebangan pohon secara ilegal di wilayah hukum Polres Berau ditemui beberapa kendala atau hambatan, antara lain:

 - a. Hukum yang belum bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku *illegal logging*
 - b. Wilayah Kabupaten Berau yang luas dan masih banyaknya hutan yang tidak bisa diawasi oleh Kepolisian dan instansi terkait
 - c. Masyarakat sekitar hutan hanya bisa melakukan pekerjaan penebangan pohon secara ilegal dan tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain dan masyarakat sekitar hutan ketergantungan dengan hasil hutan

¹⁷ Wawancara dengan AKP Yogi Hardiman, SIK, selaku Kasatreskrim Polres Berau, pada tanggal 3 Oktober 2012

seperti kayu dan hasil yang didapat dari penebangan pohon tersebut cepat terjual dan menghasilkan uang.

- d. Adanya oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi
- e. Kurangnya Personil Kepolisian yang ada di lapangan
- f. Sarana, prasarana dan anggaran kepolisian yang masih minim

Menurut Widjil Rahadi, S.Hut¹⁸, selaku Kepala Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau diperoleh keterangan bahwa cara untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi adalah dengan memanggil pejabat dan petugas yang terlibat, lakukan pembinaan dan warning serta mencari alternatif kehidupan seperti bertani dan berkebun bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Yogi Hardiman, SIK¹⁹ selaku Kasatreskrim Polres Berau diperoleh keterangan bahwa rencana penegakan hukum khususnya dalam penyidikan terhadap penebangan pohon secara ilegal untuk masa yang akan datang pihak Polres Berau akan lebih proaktif untuk melakukan giat operasi rutin ke daerah rawan tindak pidana *illegal logging* dan juga didukung dari atensi Kapolda melalui DirReskrimsus untuk selalu melakukan pengungkapan kasus *illegal logging* setaip bulannya, tidak lupa juga dengan melibatkan instansi terkait yaitu penegak hukum sendiri dan pemerintah daerah untuk meminimalisir terjadinya kegiatan *illegal logging* di daerah Kabupaten Berau serta peran dari

¹⁸ Wawancara dengan Widjil Rahadi, S.Hut¹⁸, selaku Kepala Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, pada tanggal 8 Oktober 2012

¹⁹ Wawancara dengan AKP Yogi Hardiman, SIK, selaku Kasatreskrim Polres Berau, pada tanggal 3 Oktober 2012

masyarakat yang ada di Kabupaten Berau, untuk memberantas para pelaku tindak pidana *illegal logging* dengan melaporkan kepada kepolisian terdekat apabila di daerahnya terdapat kegiatan penebangan hutan secara berlebihan untuk kegiatan mencari kekayaan pribadi agar segera dilakukan penangkapan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Sedangkan menurut Widjil Rahadi, S.Hut²⁰, selaku Kepala Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau diperoleh keterangan bahwa rencana penegakan hukum khususnya dalam penyidikan terhadap penebangan pohon secara ilegal untuk masa yang akan datang akan dilakukan lebih keras lagi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena Kabupaten Berau sudah mampu di *pilot project* penghasil karbon bagi dunia, jadi penebangan ilegal dan pembukaan kawasan hutan harus sesuai dengan perijinan yang sah.

Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk atau modus operandi tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaku menggunakan cara dengan mengangkut kayu hasil penebangan secara ilegal dengan menyimpan di bawah tumpukan kayu rakyat;
 - b. Kayu-kayu yang sudah ditebang secara ilegal, kemudian dibuat kayu blambangan/bantalan dan diangkut dengan kendaraan truk dan memasang jaringan di setiap jalan untuk memantau patroli/razia dari petugas kepolisian;

- c. Pengangkutan kayu dilakukan pada waktu dini hari sampai menjelang subuh;
 - d. Pelaku selalu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian apakah pihak Kepolisian akan melakukan patroli atau tidak;
 - e. Pelaku menggunakan dokumen dari wilayah kabupaten lain pada saat melakukan pengangkutan kayu;
 - f. Pelaku menggunakan dokumen yang sudah mati atau dengan mengikuti dokumen perusahaan yang sudah berjalan;
 - g. Cukong memberikan ongkos kepada masyarakat sekitar hutan untuk melakukan penebangan kayu di hutan yang kemudian hasil kayu tersebut diambil oleh cukong (pemberi dana) dengan dibeli secara murah;
 - h. Memberikan upeti kepada oknum petugas setempat;
 - i. Dalam melakukan pengangkutan kayu dari hutan sampai ke pinggir laut dengan menggunakan sarana mobil truk;
 - j. Kayu tebangan secara ilegal diambil di areal KBK maupun areal KBNK;
 - k. Kayu diambil di areal clearing perkebunan yang tidak diambil oleh perusahaan.
2. Penyelesaian terhadap kasus-kasus penebangan pohon secara ilegal dilakukan dengan cara diawali dengan penyelidikan kemudian melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan serta pemberkasan dan diakhiri dengan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan. Selama tahun 2012 sampai bulan Oktober, jumlah kasus *illegal logging* yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II di Polres Berau adalah sebanyak 11 kasus. Setelah selesainya proses penyidikan (tahap

²⁰ Wawancara dengan Widjil Rahadi, S.Hut, selaku Kepala Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, pada tanggal 8 Oktober 2012

- II) selanjutnya adalah kegiatan penyidik akan langsung melimpahkan tahanan beserta barang bukti kepada Kejaksaan.
3. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi penebangan pohon secara ilegal diantaranya adalah:
- a. Preemptif
 - 1) Dengan mengajak Dinas/Instansi terkait dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kepada masyarakat
 - 2) Menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penebangan pohon secara ilegal
 - 3) Pemasangan tanda-tanda larangan menebang pohon di kawasan hutan
 - b. Preventif
 - 1) Satreskrim bersama dengan jajaran Polsek, Sat Shabara, Sat Lantas dan dinas terkait melakukan giat operasi/patroli gabungan di daerah yang rawan akan terjadinya *illegal logging*.
 - 2) Menanam jaringan untuk memberikan informasi adanya penebangan pohon secara ilegal
 - 3) Mengadakan pelatihan Kadarkum terhadap RT, Kepala Desa, Linmas dan masyarakat untuk bersama-sama mengerti dan memahami amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- c. Represif

Melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal logging* dengan melakukan penangkapan pelaku *illegal logging* sehingga menimbulkan efek jera.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, Editor in Chief: Bryan A. Garner, West Group Publishing Co., St. Paul – Minnesota, 1999
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Nurdjana, IGM., et.al., *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Prasetyo, Didik, *Illegal Logging, Suatu Malpraktek Bidang Kehutanan*, materi Semiloka Inisiatif Daerah Dalam Penanggulangan *Illegal Logging*, di Sendawar (Kutai Barat), Kalimantan Timur, Januari 2003